
Analisis Kegagalan *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC) dalam Meminimalisir Persaingan Senjata Nuklir India-Pakistan

Ni Kadek Erlin Astadwita¹⁾, Anak Agung Bagus Surya Widya Nugraha²⁾, Penny Kurnia Putri³⁾

^{1,2,3)} Hubungan Internasional/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Universitas Udayana

Abstrak

South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) merupakan salah satu organisasi internasional regional yang memiliki kendala secara institusional disebabkan oleh konflik internal anggotanya. Konflik internal tersebut salah satunya yakni konflik historis Kashmir India-Pakistan yang terlalu lama berlangsung tanpa upaya mediasi dari SAARC sendiri. Dampaknya memunculkan aksi serangan kelompok teroris berorientasi Kashmir-Pakistan ke India di tahun 2016 yang mempengaruhi pembatalan KTT-19 SAARC 2016 di Pakistan dan memulai babak baru persaingan senjata nuklir India-Pakistan. Teori institusionalisme digunakan sebagai pisau analisis untuk mencari faktor yang belum dipenuhi oleh SAARC untuk menjadi organisasi internasional yang sukses. Adapun fenomena yang dianalisis yakni rentetan penyerangan oleh terorisme di India tahun 2016-2019, aktivitas persaingan senjata nuklir India-Pakistan 2016-2021, keterlibatan negara aliansi dalam pengembangan senjata nuklir India-Pakistan, dan implikasinya terhadap SAARC serta kawasan. Berdasarkan hasil analisa ditemukan bahwa SAARC belum memenuhi empat faktor yakni perkiraan masa depan, keteraturan situasi, adanya informasi akurat mengenai aktor, dan respon balik yang cepat sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan negara anggota terhadap relevansi SAARC

Kata-kunci: SAARC, India, Pakistan, Senjata nuklir, Kerja sama

Abstract

The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) is a regional international organization that has institutional obstacles caused by internal conflicts among its members. One of these internal conflicts is the historical India-Pakistan Kashmir conflict which has been going on for too long without mediation efforts from SAARC itself. The impact gave rise to attacks by Kashmir-Pakistan oriented terrorist groups on India in 2016 which influenced the cancellation of the 19th SAARC Summit in Pakistan and started a new phase of India-Pakistan's arms race. Institutionalism theory is used as an analytical tool to look for factors that have not been fulfilled by SAARC to become a successful international organization. This research analyzes these phenomena, such as the series of terrorist attacks in India in 2016-2019, the activities of India-Pakistan's arms race development in 2016-2021, the involvement of alliance countries in the development of India-Pakistan nuclear weapons, and its implications for SAARC and the region. As the result of the analysis, it was found that SAARC has not fulfilled four factors, such as long-time horizon, regularity of stakes, reliability of information about the others' actions, and quick feedback, thus affecting the level of members' trust of SAARC's relevance

Keywords: SAARC, India, Pakistan, Nuclear Weapon, Cooperation

Kontak Penulis

Ni Kadek Erlin Astadwita

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Alamat: Jalan PB Sudirman (Kampus Sudirman) Denpasar, Bali

Telp: +62 361 255378 Fax: +62 361 255916

E-mail: erlinasta@student.unud.ac.id

PENDAHULUAN

Asia Selatan merupakan salah satu wilayah regional yang juga memiliki *consent* terhadap suatu hubungan bilateral atau multilateral yang ideal. Akhirnya negara-negara di kawasan Asia Selatan membentuk organisasi regional yang disebut dengan *The South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC). SAARC dibentuk pada 8 Desember 1985 di Dhaka, Bangladesh dengan penetapan Piagam SAARC yang menyatakan bahwa mereka memiliki keinginan dalam menciptakan perdamaian, stabilitas, persahabatan dan kemajuan di kawasan berdasarkan prinsip Piagam PBB. Adapun dalam *SAARC Charter* pada artikel satu yang berisikan upaya dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas keamanan regional. Lalu artikel dua yang menyebutkan terkait objektivitas perdamaian, kebebasan, dan hubungan yang baik serta kerja sama yang bermakna antar negara tetangga (SAARC, 2020)

Menganalisis artikel satu dan dua dalam piagam SAARC yang memiliki maksud untuk meminimalisir maupun mengatasi permasalahan minor hingga major dalam kawasan secara diplomatis sehingga tidak menimbulkan gesekan antara anggota asosiasi. Namun implementasi dari piagam SAARC pada sektor keamanan kawasan sedikit dipertanyakan pada konflik India-Pakistan. Konflik wilayah Kashmir antara India-Pakistan telah berlangsung lama sejak India-Pakistan merdeka dari Inggris, India yang melihat bahwa Kashmir masuk wilayahnya sebab mereka dipimpin oleh raja beragama hindu sedangkan Pakistan melihat bahwa Kashmir merupakan wilayah dengan mayoritas penduduknya yang beragama islam sehingga sudah sepatutnya masuk wilayah Pakistan. Sengketa wilayah tersebut berlangsung lama dan sejauh ini mereka telah empat kali berkonflik dalam rentang waktu 1947 sampai 1999. Konflik tersebut tidak hanya memperebutkan wilayah

Kashmir namun juga memulai babak baru perkembangan senjata nuklir pada wilayah regional Asia Selatan khususnya antara India-Pakistan.

Kekuatan persenjataan nuklir India dan Pakistan tentunya saling bersaing satu sama lain melalui uji coba senjata nuklir sejak pada tahun 1998. Ditambah keputusan kedua negara tersebut untuk tidak menandatangani *Non-Proliferation of Nuclear Weapons Treaty* (NPT) terkadang mempersulit lembaga *International Atomic Energy Agency* (IAEA) untuk mengawasi juga memperoleh transparansi informasi mengenai pengembang senjata nuklir di wilayah mereka. Namun masing-masing negara ini mengesahkan suatu doktrin atau kebijakan dalam memastikan stabilitas keamanan bagi negara di sekitar kawasan. Misalnya India mengesahkan kebijakan "*No First Use*" (NFU) yakni kebijakan penggunaan senjata nuklir sebagai bentuk balasan jika mengalami serangan terlebih dahulu dan tidak akan menggunakannya kepada negara non-nuklir. Sedangkan Pakistan memiliki kebijakan *Full Spectrum Deterrence* (FSD) merupakan respon agresif terhadap postur nuklir India ditingkat mana pun (Hans, et al., 2023).

SAARC selaku organisasi regional sempat berperan sebagai mediator konflik pasca perang Kargil tahun 1999 yang menghasilkan "*Deklarasi Lahore*". Deklarasi tersebut membahas komitmen kedua negara dalam penggunaan senjata nuklir yang bertanggung jawab. Selain itu, India-Pakistan memanfaatkan forum pertemuan SAARC untuk membahas hubungan bilateral kedua negara di sela-sela pertemuan *12th SAARC Summit* dan *13th SAARC Summit*. Keharmonisan antara India-Pakistan sempat terjadi pasca insiden bom Hotel Mumbai 2008, ketika itu India-Pakistan bekerja sama dalam menangkap

pelaku penyerangan. Pada pagelaran *18th SAARC Summit* di Nepal tahun 2014, India-Pakistan mengadakan pertemuan untuk membahas lebih lanjut hubungan bilateral. Pada tahun 2016, terjadi peristiwa penyerangan di Pathankot India oleh Jaish-e-Muhammad (JEM) yang dilatarbelakangi oleh upaya pembatalan pencabutan Pasal 370 Konstitusi India mengenai status khusus pada Kashmir, konflik di wilayah LOC, serta respon terhadap tindak kekerasan kepada masyarakat muslim di Kashmir (The Diplomat, 2016). Aksi dari penyerangan tersebut menyebabkan perhelatan *19th SAARC Summit* tahun 2016 di Pakistan dibatalkan sebab pihak India yang menolak untuk menghadiri pertemuan dan diikuti negara Bangladesh, Bhutan dan Afganistan yang turut mengundurkan diri dari pertemuan. Pasca pembatalan *19th SAARC Summit* di tahun 2016, sampai saat ini SAARC belum melakukan pertemuan formal kembali bersama dengan negara anggota. Selain peristiwa penyerangan dan pembatalan *19th SAARC Summit*, ditemukan juga beberapa aksi pengembangan atau pembelian senjata nuklir antara India dan Pakistan.

Menurut hasil laporan SIPRI tahun 2022, India menjadi negara pengimpor senjata utama terbesar di dunia tahun 2018-2022 dengan pangsa sebesar 11% dari total impor senjata global. Adapun pemasok terbesar persenjataan ke India dipegang oleh Rusia sebesar 45% dan Perancis dengan perjanjian pembelian senjata yang mencakup 62 pesawat tempur dan 4 kapal selam tahun 2013 hingga 2022. Di satu sisi, Pakistan mendapatkan sumber impor persenjataannya dari China yang menunjukkan peningkatan 14% 2013 hingga 2022 dan menyumbangkan 3.7% dari total global. Selain persenjataan, China sendiri juga turut dalam menyuplai reaktor nuklir ke Pakistan sejak tahun 1993 dan terjadi penambahan jumlah reaktor aktif signifikan

sejak tahun 2016 (World Nuclear Association, 2023).

Kondisi pengembangan senjata nuklir yang dimiliki oleh India dan Pakistan beserta dengan kebijakan nasional yang mereka sahkan sebagai jaminan penggunaan senjata yang bertanggung jawab, sayangnya mengancam stabilitas keamanan Kawasan Asia Selatan. Hal ini diperparah dengan buruknya hubungan India dan Pakistan sejak awal mengenai wilayah Kashmir yang kemudian mendorong ketegangan perbatasan serta kelompok ekstrimis seperti JEM memperkeruh konflik. Efek domino ini mampu menggambarkan kompleksitas dari tantangan keamanan yang dihadapi oleh SAARC dan kawasan dalam menjalankan efektifitasnya merangkul seluruh negara Asia Selatan sesuai artikel satu dan dua dalam *SAARC Charter*. Hal ini kemudian menjadi menarik ketika ada beberapa faktor yang menyebabkan SAARC gagal dalam meminimalisir persaingan senjata nuklir India-Pakistan, melalui penelitian ini penulis akan menyampaikan faktor-faktor tersebut melalui analisis dan kacamata studi hubungan internasional yang dipilih.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskripsi. Metode ini digunakan dalam menjelaskan objek penelitian secara naratif terhadap proses dan analisis fenomena sosial politik internasional yakni upaya SAARC menghadapi kendala dan tantangan di kawasan Asia Selatan dan mempertahankan efektifitasnya sebagai organisasi internasional melalui indikator dari teori Liberalisme Institusionalisme. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan sumber data sekunder dari artikel, jurnal, buku, portal berita dan sejenisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Bilateral India-Pakistan Pasca Aksi Terorisme

Penyerangan tahun oleh Jaish-e-Muhammad (JEM) di Pathankot tahun 2016, India dan Pakistan terus terlibat pergesekan hingga mempersempit kesempatan bilateral kedua negara. Pada penyerangan Pathankot, JEM menargetkan pangkalan *Indian Air Force* (IAF) dan berhasil menewaskan 15 personil keamanan India (The Diplomat, 2016). Aksi ini terjadi pada 1 Januari 2016 tepat beberapa hari setelah Perdana Menteri India Modi mengunjungi Lahore untuk mendiskusikan hubungan bilateral dengan Pakistan. Serangan selanjutnya terjadi pada 18 September yang menasar kamp militer Angkatan Darat India di kota Uri, pelaku teroris membom tempat penampungan bahan bakar kendaraan militer AD India dan berhasil menghilangkan 18 nyawa tentara dan 30 lainnya luka-luka (CNN, 2016). Kedua penyerangan tersebut sukses memperkeruh hubungan dua negara dan dimulailah aksi saling menyalahkan dan aksi balasan. Pada 29 September 2016, pasukan militer India melalui aksi *surgical strike* pada kamp yang disinyalir *basecamp* dari JEM dan berhasil membunuh militan sejumlah dua digit namun pernyataan itu disangkal oleh Pakistan yang mengatakan bahwa serangan India hanya memakan dua korban jiwa (Washington Post, 2016).

India yang melihat bahwa aksi penyerangan Pathankot dan Uri oleh teroris didukung oleh Pakistan secara strategi dan persenjataan. Perspektif India tentunya menunjukkan sifat agresif dan skeptis terhadap Pakistan sehingga mendorong India melakukan aksi balasan. Disatu sisi Pakistan membuat seruan dukungan terhadap orang Kashmir melalui pidato pembuka dalam Majelis Umum PBB pada 21 September 2016, PM Sharif berbicara mengenai pelanggaran HAM di wilayah Jammu serta menyalahkan India atas terbunuhnya Burhan Wani yang mereka

anggap sebagai pemimpin muda dari kelompok gerakan damai (Indian Council of War Affairs, 2016). India sendiri menganggap jika Burhan Wani merupakan teroris Hizbul Mujahidin yang kerap kali membocorkan informasi terkait operasi keamanan di wilayah Kashmir.

Penyerangan teroris terhadap India kembali terjadi di tahun 2019. Pada tanggal 14 Februari, JEM melakukan penyerangan menggunakan mobil SUV bermuatan 350 kg peledak terhadap konvoi militer India *Central Reserve Police Force* (CRPF) yang berjumlah 78 kendaraan yang mengangkut 2500 CRPF. Serangan itu berhasil menewaskan 40 personil dan melukai CRPF lainnya. Serangan itu diperingati sebagai peristiwa Pulwama yang selanjutnya memotivasi India melakukan serangan ke daerah Balakot Pakistan di tanggal 26 Februari.

Rentetan aksi penyerangan teroris yang diterima India menunjukkan jika kawasan Asia Selatan masih belum lepas dari ancaman kelompok teroris. SAARC sendiri mengakui ancaman keamanan dari kelompok terorisme di tingkat regional. Hal ini terlihat dari beberapa konvensi dan program kerja dari SAARC yakni Konvensi Regional Penanggulangan Terorisme, Protokol Tambahan Konvensi Regional Penanggulangan Terorisme, SAARC Terrorist Offences Monitoring Desk (STOMD), dan SAARC Drugs Offences Monitoring Desk (SDOMD). Konvensi Regional Penanggulangan Terorisme dan Protokol Tambahan Konvensi Regional Penanggulangan Terorisme berisikan mengenai strategi yang digunakan oleh SAARC dalam menangkap pelaku terorisme melalui perjanjian ekstradisi, kerja sama lembaga imigrasi dan bea cukai, kerja sama antar lembaga hukum, dan persamaan definisi pelaku terorisme. STOMD sendiri merupakan badan yang disahkan oleh SAARC untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyebarkan informasi tentang teroris, taktik, strategi dan metode yang terdiri atas

para ahli dari seluruh kawasan regional (Islam dalam Rosand et al, 2009). Lalu SDOMD kemudian dibentuk sebagai “pelengkap” sistem kerja dari STOMD, alasannya yakni para ahli yang dibentuk oleh SAARC melihat adanya indikasi dari perdagangan ilegal narkoba bisa jadi merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh kelompok teroris dalam meningkatkan kapabilitas militer dan perluasan sistem recruitment sebelum melancarkan aksi serangan. Disamping itu, SAARC juga memiliki *SAARC Council of Minister* yang telah mengadopsi “*Declaration on Cooperation in Combating Terrorism*” yang membahas mengenai proposal dalam menjalankan agenda anti terorisme pada kawasan Asia Selatan di tahun 2009. Walaupun SAARC memiliki kesadaran dan upaya penanggulangan aksi terorisme, tetapi implementasi strategi tersebut masih belum optimal yang dapat terlihat dari rentetan aksi penyerangan terorisme di India tahun 2016 dan 2019.

Aktivitas Senjata Nuklir India-Pakistan

Kekisruhan yang dialami oleh India-Pakistan menjadi momentum bagi kedua negara untuk mengembangkan persenjataan nuklir mereka menjadi lebih variatif dan modern. Terkhususnya pasca tahun 2016, baik India maupun Pakistan mengalami kenaikan frekuensi yang signifikan pada aktivitas seperti pembelian dan uji coba senjata nuklir, pengembangan rapid tersebut dapat berupa pengembangan rudal baru, pengembangan rudal lama menjadi versi yang lebih mutakhir dan *modern*, maupun hasil kolaborasi dengan negara diluar kawasan. Selain pengembangan dan uji coba senjata nuklir, ditemukan juga beberapa pembelian persenjataan untuk *support* kemampuan dari rudal masing-masing negara oleh aliansi yang diikuti India-Pakistan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari *The World Bank*, terjadi penurunan sebelum penyerangan teroris di tahun 2015 dan terjadi

peningkatan anggaran dalam pembelian senjata di tahun berikutnya. Pakistan meningkatkan anggaran yang sebelumnya USD 771 Juta pada tahun 2015 naik menjadi USD 830 Juta di tahun 2016 dan kembali meningkat di tahun 2017 sebesar USD 868 Juta. Di sisi lain, India baru menaikkan anggarannya di tahun 2017 sebesar USD 2.89 Miliar. Selain anggaran, fenomena *arms transfer* pada pasar global menunjukkan jika pada periode 2012-2016 India dan Pakistan masuk kedalam sepuluh negara teratas penerima impor persenjataan (SIPRI, 2021). Adapun negara yang berkontribusi sebagai eksportir ke India dalam rentan waktu 2017-2021 yakni Rusia sebesar 46%, Perancis sebesar 27%, dan Amerika Serikat sebesar 12%. Dalam rentan waktu yang sama, Pakistan memperoleh persenjataan dari negara China sebesar 72%, Swedia 6.4%, dan Rusia sebesar 5.6%.

Dari keseluruhan aktivitas *arms transfer* dan kerja sama pengembangan senjata oleh India-Pakistan bersama dengan negara bilateral dan aliansi, tentu persenjataan yang dikembangkan tersebut termasuk juga senjata berbahan nuklir berupa misil. Baik dari India-Pakistan memiliki inventory senjata nuklir dengan kekuatan dan jangkauan yang beragam mengingat pengembangan senjata nuklir telah dilakukan sebelum abad ke-21 hingga pengesahan doktrin nuklir pun dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban serta jaminan atas penggunaan senjata nuklir nantinya. Untuk *inventory* persenjataan nuklir India terdiri dari rudal balistik berbasis darat, rudal balistik berbasis laut, dan rudal jelajah dengan jangkauan mulai dari 350 Km hingga 3.500 Km. Lalu *inventory* persenjataan nuklir Pakistan terdiri dari rudal balistik berbasis darat dan rudal jelajah dengan jangkauan mulai dari 200 Km hingga 2.200 Km. Berdasarkan data yang dihimpun melalui *Bulletin of the Atomic Scientists* dan *Center for Strategic & International Studies*, menunjukkan bahwa India-Pakistan cenderung lebih aktif melakukan uji coba

senjata nuklirnya sejak 2016 hingga 2021 padahal uji coba pertama kali senjata nuklir telah dilakukan pada tahun 1970an.

Sayangnya kedua negara pemilik senjata nuklir yakni India-Pakistan justru memutuskan untuk tidak menandatangani maupun meratifikasi perjanjian NPT dan CTBT. *Non Proliferation Nuclear Weapon Treaty* (NPT) merupakan suatu perjanjian internasional untuk meminimalisir pengembangan teknologi senjata bertenaga nuklir dengan tujuan pelucutan senjata nuklir maupun umum demi perdamaian yang diikuti oleh negara-negara yang memiliki persenjataan berbasis nuklir. NPT sendiri dalam praktiknya melakukan pengawasan terhadap kepatuhan negara anggota melalui lembaga *Internasional Atomic Energy Agency* (IAEA) yang mengumpulkan serta meninjau semua informasi dan temuan secara independen menggunakan pendekatan *safeguards* IAEA dan rencana pengamanan guna mengevaluasi program penggunaan senjata nuklir negara anggota guna mengidentifikasi adanya kecurangan atau inkonsistensi yang perlu ditindaklanjuti (IAEA, n.d). Selain NPT, kedua negara tersebut terbukti tidak menandatangani ataupun meratifikasi *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty* (CTBT) (NTI, 2019). CTBT sendiri merupakan perjanjian terhadap larangan uji coba senjata nuklir ataupun ledakan nuklir yang dianggap sebagai salah satu upaya perlucutan senjata nuklir yang diawasi oleh lembaga *Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization* (CTBTO) (NTI, 2019). Lalu implikasi yang timbul dari keputusan kedua negara tersebut yakni akan adanya potensi dan peluang yang diperoleh secara bebas oleh India-Pakistan dalam mengembangkan segala jenis senjata nuklir menggunakan segala jenis bahan nuklir pada jumlahnya bebas, kebebasan dalam melakukan uji coba senjata nuklir tanpa pengawasan dari pihak manapun, tidak adanya sanksi yang menanti jika penggunaan ataupun uji coba senjata nuklir ini tidak

sesuai dengan deklarasi ataupun doktrin negara bersangkutan, dan minimnya informasi terkait pengembangan kapabilitas senjata nuklir dan uji coba kedepannya

Baik India-Pakistan sama-sama mengesahkan kebijakan doktrin nuklir sebagai bentuk komitmen mereka terhadap penggunaan dan pengembangan senjata berbasis nuklir yang bertanggung jawab. India mengesahkan kebijakan "*No First Use*" (NFU) yakni kebijakan penggunaan senjata nuklir sebagai bentuk balasan jika mengalami serangan terlebih dahulu dan tidak akan menggunakannya kepada negara non-nuklir. Sedangkan Pakistan memiliki kebijakan *Full Spectrum Deterrence* (FSD) yang tidak pernah dirilis secara resmi dokumennya namun banyak pengamat melihat jika itu merupakan upaya ambiguitas di tengah sistem politik anarki dan doktrin Pakistan akan bersifat adaptif sebagai respon agresi terhadap postur nuklir India ditingkat mana pun.

Evaluasi Kerja Sama Keamanan SAARC

Disamping beberapa keberhasilan kerja sama SAARC dibidang ekonomi dan investasi, SAARC juga memiliki kerja sama dibidang keamanan yang masih terkendala dalam implementasinya. Adapun beberapa kerja sama yang dirancang maupun telah disahkan oleh SAARC di sektor keamanan antara lain *SAARC Regional Convention on Suppression of Terrorism* (1987); *Additional Protocol to the SAARC Regional Convention on Suppression of Terrorism* (2002); *SAARC Terrorist Offences Monitoring Desk* (STOMD); *SAARC Drugs Offences Monitoring Desk* (SDOMD); dan *Declaration on Cooperation in Combating Terrorism* (2009). Dari sekian program kerja sama SAARC di bidang keamanan, hampir seluruhnya berorientasi dalam mengatasi ancaman terorisme yang berarti ini menunjukkan ancaman keamanan di kawasan Asia Selatan berasal dari aksi terorisme dan SAARC sendiri menyadari hal tersebut.

Kompleksitas hubungan antara India-Pakistan pada isu Kashmir, isu terorisme, dan persaingan senjata nuklir memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kelangsungan SAARC. Tak tanggung-tanggung efek dari serangan terorisme di Pathankot dan Uri yakni reaksi penolakan yang diberikan oleh India terhadap undangan KTT ke-19 SAARC 2016 yang rencananya akan dilangsungkan di Islamabad, Pakistan. Selain India, negara SAARC lainnya seperti Bangladesh, Afghanistan, dan Bhutan juga turut menunjukkan keengganan untuk menghadiri KTT tersebut. Pakistan disatu sisi tentunya sangat menyayangkan reaksi dari India atas buruknya cara penyelesaian konflik kedua negara yang menyebabkan pembatalan perhelatan KTT ke-19 SAARC tersebut.

Faktor lainnya yakni SAARC memiliki kendala dalam manajemen konflik bilateral ataupun multilateral anggota organisasinya. Menurut Inayat (dalam Ahmad, 2017) SAARC memasukkan pasal 10 dalam Piagam SAARC atas desakan dari India yang menyatakan bahwa mereka menghormati urusan dalam negeri dari negara anggota sehingga kerja sama regional tidak dapat dijadikan forum alternatif maupun wadah dalam pembahasan kekosongan kewajiban dari urusan bilateral atau multilateral. Pasal itu menjadi boomerang kepada SAARC hingga menyebabkan pembatalan KTT ke-19 SAARC 2016 padahal agenda yang akan dibahas dalam forum KTT ke-19 mencakup isu terorisme; ketidakseimbangan perdagangan; kurangnya investasi; penyelundupan; kemiskinan; dan buta huruf (Khan, 2016). Pembatalan ini bukan merupakan kasus pertama bagi SAARC, sebelumnya SAARC pernah menunda pelaksanaan KTT ke-6 dari tahun 1988-1991 disebabkan oleh insiden Tamil antara India-Sri Lanka; KTT ke-9 di tahun 1996 disebabkan oleh ketidaksiapan dari Maladewa selaku tuan rumah sehingga baru dapat dilangsungkan di tahun selanjutnya yakni 1997; serta KTT-11 yang

disebabkan oleh penolakan India untuk menghadiri KTT mengingat terjadi konflik Kargil dan kudeta militer di Pakistan.

Sekretariat SAARC sendiri menyadari keterlambatan pelaksanaan KTT SAARC akan mempengaruhi stabilitas kawasan. Untuk mengatasi masalah tersebut, akhirnya Sekretariat SAARC melakukan amandemen Piagam SAARC pada pelaksanaan KTT ke-18 SAARC 2014 di Kathmandu. Mengutip dari Ahmad (2017) Piagam SAARC akhirnya menetapkan bahwa KTT harus dilaksanakan tiap dua tahun sekali atau lebih sering jika diperlukan dengan *Council of Minister* dan *The Standing Committee* bertemu tiap setahun sekali serta *Technical Committees* bertemu setidaknya dua kali setahun. Walaupun Piagam telah diamandemen, faktanya rencana ini masih belum bisa diimplementasikan dengan baik bahkan setahun kemudian pada KTT-19 SAARC sebab permasalahan dalam bilateral yang menyebabkan ketidakpercayaan antar anggota organisasi ada pada titik puncak.

Insiden pembatalan KTT SAARC selama ini dipengaruhi oleh penundaan atau keengganan India yang semena-mena, hal ini juga menunjukkan bahwa India memiliki pengaruh tersendiri di forum kawasan tersebut. Ketidaktertarikan India terhadap SAARC ini memang sudah terlihat dari kebijakan India pasca tahun 2014, India lebih memilih untuk mengembangkan potensi negaranya melalui hubungan bilateral melalui kebijakan *Neighborhood First* dan menjalin hubungan bilateral dan multilateral di luar kawasan Asia Selatan seperti BRICS dan BIMSTEC (The Diplomat, 2022). Disamping perilakunya yang cenderung semena-mena, faktanya memang India merupakan negara di kawasan yang memiliki *hegemony* yang akhirnya memberikannya peran penting dalam memajukan potensi dan permasalahan di kawasan. Reaksi penolakan India pada undangan KTT-19 SAARC 2016 dapat dianggap sebagai salah satu upaya dalam

‘mengisolasi Pakistan’, sebab ketidakhadiran Bangladesh;Afghanistan; dan Bhutan menunjukkan jika kebijakan *Neighborhood First* membuahkan hasil mengingat ketiga negara tersebut merupakan rekan bilateral India di kawasan. Selain itu, India juga mencabut Perjanjian Air Indus dan hubungan perdagangan yakni status *Most Favored Nation* yang sebelumnya diberikan ke Pakistan di tahun 1996.

Melihat upaya India dalam mengisolasi Pakistan pasca insiden teroris di tahun 2016 serta belum terlaksananya KTT-19 SAARC, maka dapat dipastikan jika *hegemony* India berkaitan erat dengan kelangsungan SAARC. *Power* yang dimiliki oleh SAARC masih belum mampu meyakinkan kepala negara anggota kawasan atas fungsi dan kebermanfaatan yang mampu dibawa oleh SAARC. Belum lagi dengan India yang terus meningkatkan kapabilitas nuklir dan Pakistan yang mengikuti postur nuklir India tentunya menghantui negara non-nuklir lainnya di kawasan Asia Selatan.

Indikator yang Berhasil Terpenuhi

Selama SAARC dibentuk, SAARC telah memenuhi tiga indikator fundamental organisasi Internasional. Indikator tersebut dapat dikatakan sebagai landasan dan urgensi babak baru dari kerja sama di tingkat regional. Berikut merupakan tiga indikator yang telah dipenuhi oleh SAARC:

a. Kesamaan Kepentingan

Negara di kawasan Asia Selatan memiliki persamaan pada masalah nasional masing-masing contoh seperti kasus kemiskinan, akses pendidikan, peningkatan pendapat nasional, hingga ancaman terorisme di perbatasan. Dalam bidang kerja sama *Information and Poverty Alleviation* dan , *Economic Trade and Finance*, SAARC mengakui jika negara anggota SAARC (khususnya negara tertinggal atau negara dengan kondisi geologi yang ekstrim) menghadapi hambatan dan ancaman

struktural yang memiliki dampak pada produktivitas yang lemah dan biaya dagang yang tinggi sehingga mempengaruhi perdagangan eksternal mereka. Sehingga pemimpin negara anggota pada KTT SAARC ke 18 menerapkan fasilitas preferensi yang efektif guna memastikan kebermanfaatan yang diterima oleh negara tertinggal yang nantinya akan berada dibawah SAFTA dan SATIS. Untuk mengatasi kasus buta huruf dan peningkatan pendidikan, SAARC telah merancang program pertukaran pelajar dan promosi fasilitas pendidikan yang terus dievaluasi dan ditingkatkan pada forum KTT SAARC.

b. Jumlah Aktor

Indikator ini merujuk pada beban kepentingan yang dibawa oleh SAARC. Pada dasarnya, organisasi internasional difungsikan sebagai strategi lain dalam mencapai kepentingan nasional sehingga jumlah aktor yang terlibat tentunya mempengaruhi beban kepentingan yang harus dipenuhi oleh SAARC. Jika kita bandingkan jumlah aktor yang terlibat dari masing-masing organisasi internasional, maka dapat kita lihat jika SAARC memiliki jumlah aktor negara yang tidak banyak yakni sebanyak delapan negara dibandingkan dengan NATO dengan 32 anggota, ASEAN dengan 11 anggota, dan Uni Eropa dengan 27 negara. Lalu kita bandingkan jumlah anggota dari SAARC dengan indikator persamaan kepentingan, data-data tersebut menunjukkan jika mayoritas negara anggota yang terlibat memiliki permasalahan serupa sehingga sudah dipastikan jika beban kepentingan dari SAARC tidaklah berat. Perlu kita ingat jika asumsi dasar institusionalisme melihat banyaknya jumlah aktor yang terlibat akan mempengaruhi efektivitas kerja sama dan tidak mampu menghasilkan *output* yang maksimal.

c. Jangka Waktu Harapan di Masa Depan

Indikator ini merujuk pada durasi berjalannya kerjasama atau 'umur' dari organisasi SAARC. Menurut Keohane, jangka waktu tidak bisa lepas dari keteraturan situasi sehingga negara cenderung memiliki kerja sama yang 'awet' jika negara tersebut pernah memiliki kerja sama yang berhasil tanpa aksi pembelotan. Ini menunjukkan sifat negara yang cenderung merasa lebih aman jika bekerjasama lagi dengan pihak yang sama dalam kerja sama terdahulu. Dalam indikator ini, India yang merupakan negara besar di kawasan dapat dijadikan contoh mengingat kerja sama yang dimilikinya terhadap negara lain diluar kerja sama di bawah SAARC.

Contoh pertama yakni *Neighbourhood First Policy* yang disahkan pada tahun 1951 yang merupakan bentuk kebijakan bilateral antara India dengan negara Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, Maladewa, dan Pakistan. Kebijakan ini memiliki fokus pada sektor keamanan, investasi dan kredit, dan pariwisata.

Indikator yang Gagal Terpenuhi

Melampaui jumlah indikator yang terpenuhi, SAARC masih belum mampu memenuhi indikator dari teori institusionalisme lainnya. Sayangnya, indikator tersebut berkenaan dengan fungsionalisme organisasi internasional dan strategi implementasi perjanjian regional. Dampak dari buruknya implementasi perjanjian regional tersebut mempengaruhi efektivitas SAARC selaku organisasi regional serta menurunkan tingkat kepercayaan negara anggota baik satu sama lain atau terhadap SAARC. Berikut merupakan empat indikator yang gagal dipenuhi oleh SAARC.

a. Perkiraan Masa Depan

Keohane dalam karya tulisnya juga memaparkan beberapa hal yang dapat menjadi pengaruh kerja sama yang efektif

diantaranya yakni strategi organisasi dalam menangani potensi atau eksistensi konflik antar anggota organisasi, bayangan terhadap masa depan yang jelas, serta strategi dari organisasi dalam memberikan sanksi bagi anggota yang membelot. Strategi manajemen konflik antar anggota organisasi yang memiliki sejarah konflik maupun perbenturan kepentingan perlu dilakukan dengan pendekatan hati-hati sebab jika konflik tersebut besar maka itu akan mempersulit perundingan dalam organisasi, itu juga akan memperbesar potensi bagi negara untuk membelot semisal faktor itu juga diikuti dengan perbedaan persepsi antar aktor dalam mutualitas kepentingan. Efek yang ditimbulkan pun juga tidak main-main seperti kurangnya rasa menghargai kerja sama, minimnya tingkat kepercayaan, dan ketidakpatuhan aktor negara.

Lalu bagaimana dengan SAARC? SAARC memiliki sistem perundingan buruk yang berpengaruh pada sistem manajemen konfliknya. Mekanisme diskusi yang terbatas merupakan ancaman bagi organisasi dalam menghadapi konflik kecil, kompleks maupun ketidaksepakatan dalam diskusi. Hal ini terlihat dari sistem perundingan dalam forum yang melarang pembahasan konflik bilateral ataupun multilateral dibahas, perlu kita ingat jika suatu rancangan yang melibatkan beragam kepentingan antar negara akan menjadi sulit dilakukan jika rasa permusuhan dan ketidakpercayaan antar anggota organisasi belum diselesaikan. Dampaknya tentu kurangnya partisipasi ataupun minat anggota organisasi dalam terlibat merancang solusi maupun strategi kolektif terhadap permasalahan regional. Perlu adanya upaya dalam menganalisis ekspektasi dan negosiasi yang diinterpretasikan aktor oleh lembaga yang diciptakan (Axelrod & Keohane, 1985).

Secara fakta lapangan, SAARC selaku organisasi regional pun terkena dampak dari konflik India-Pakistan hingga menunda pertemuan regional sampai waktu yang tidak

ditentukan, selain itu negara-negara kecil di Asia Selatan dilihat belum memiliki kapabilitas serta dinilai 'pantas' untuk menginisiasi negosiasi maupun mediasi negara dominan India-Pakistan. Perbedaan gaya kedua negara dalam melakukan diskusi manajemen konflik juga mempengaruhi, India cenderung mengedepankan strategi bilateral berbeda dengan Pakistan yang condong pada forum internasional. Konflik cenderung memburuk jika para aktor menghindari kerja sama dalam jangka pendek demi membangun reputasi ketegasan dalam jangka panjang (Axelrod & Keohane, 1985). Ketidakpercayaan dan respon negatif dari India dapat kita pahami sebab minimnya keuntungan atau imbalan yang akan diperoleh India jika terus menginvestasikan waktu, tenaga dan materil terhadap prospek SAARC kedepannya. Hal ini bisa tentu sesuai dengan Axelrod & Keohane (1985) yang berpendapat jika semakin banyak imbalan di masa depan yang terlihat maka motivasi untuk membelot kecil.

Strategi terakhir yang belum diimplementasikan dengan baik oleh SAARC yakni upaya dalam pencegahan kecurangan dan penetapan sanksi bagi negara pelanggar. Menurut Axelrod & Keohane (1985), terdapat tiga tantangan dalam pemberian sanksi bagi pelanggar yakni ketidakmampuan dalam mengidentifikasi pelanggar, pemain tidak mampu memfokuskan pembalasan pada pembelot, dan pemain tidak punya insentif untuk menghukum pembelot. Untuk kasus konflik bilateral India-Pakistan, selain adanya batasan dalam membahas konflik bilateral maupun multilateral peranan negara anggota lainnya tidak ada yang mampu atau berinisiatif untuk menjadi "mediator" dalam negosiasi. Disamping itu, negara ini pastinya tidak memiliki keberanian yang cukup dalam memastikan siapa yang patut dituding sebagai pelanggar dengan bukti yang dapat diterima oleh perspektif negara "yang dituding" tanpa mengancam hubungan diplomasi negara-negara ini. Ketidakmampuan memfokuskan pembalasan

oleh SAARC juga dipengaruhi oleh minimnya wewenang dan daya sanksi yang akan timbul jika SAARC akhirnya menetapkan sanksi bagi beberapa perilaku anggota regional yang melanggar. Hal ini bisa kita lihat dari gagalnya SAARC dalam mengimplementasikan poin yang diamanatkan pada Piagam SAARC saat KTT-18 Kathmandu di tahun selanjutnya. Kelemahan ini juga membentuk perspektif ke negara anggota jika tidak akan ada ancaman yang berarti bagi mereka jika mereka tidak mampu melaksanakan poin Piagam SAARC tersebut.

Terakhir yakni tidak adanya keuntungan yang didapat oleh para pemain jika mereka berhasil menghukum pembelot. Upaya yang diperlukan untuk meredakan konflik antara aktor yang mempengaruhi organisasi tentu tidak kalah besar. Negara anggota lainnya tentu akan bereaksi sesuai *game theory*, *Stag Hunt* dan SAARC disatu sisi tentunya akan menghindari efek gema yang ditimbulkan jika negara yang berkonflik menolak bekerja sama dengan memberikan respon kombinasi antara *Prisoner's Dilemma* dan *Tit-for-Tat* karena akan memperpanjang umur konflik. Jika SAARC pada akhirnya membentuk "sayembara" bagi negara anggota yang mau menawarkan dirinya sebagai mediator konflik maka SAARC perlu memikirkan insentif yang terdengar menjanjikan bagi "calon mediator" serta peran dan relevansi dari SAARC selaku organisasi regional akan buruk.

b. Keteraturan Situasi

SAARC bisa saja dianggap kurang mampu dalam manajemen situasi dinamis diantara anggotanya yang menimbulkan efek seperti potensi konflik dan ketidakpercayaan yang terjadi antara India-Pakistan. Khususnya pada tahun 2016 yang menjadi titik balik potensi bilateral India-Pakistan yang terancam atas kondisi keamanan yang tidak stabil. Berdasarkan dari kronologi penyerangan tersebut maka dapat kita lihat

jika salah satu pelaku yang bertanggung jawab atas ketidakstabilan dari konflik India-Pakistan yakni kelompok ekstremis yang berbasis di kawasan Asia Selatan. Sumber permasalahan seperti status wilayah konstitusi dari Kashmir yang masih menjadi perebutan dari India-Pakistan kemudian berkembang memunculkan masalah baru berupa aksi dari kelompok ekstremis bersenjata, menegangkannya hubungan politik kedua negara dan pengembangan senjata nuklir. Faktor-faktor tersebut tentu memiliki efek terhadap bentuk kerja sama yang memang mudah mengalami gangguan, apalagi melihat pandangan dan ketidakpercayaan antar dua negara yang terlihat jelas mulai tidak menghargai eksistensi kerja sama yang sebelumnya mereka rencananya di tahun 2014-2015. Dalam esai karya Axelrod & Keohane (1985) menyebutkan jika kedua pemain yang sudah tidak percaya akan terciptanya kerja sama akan menimbulkan situasi *Deadlock*. Dalam esai dari Downs, Locke, & Siverson (dalam Axelrod & Keohane, (1985)) mereka berpendapat jika perlombaan senjata merupakan salah satu dampak dari *deadlock* dan jauh lebih sulit untuk diselesaikan, pernyataan ini sesuai dengan situasi persaingan senjata nuklir India-Pakistan yang sampai saat ini belum mampu dideskalasikan oleh SAARC.

Perlu kita ingat juga jika salah satu misi dan topik eksis yang terus dibahas oleh SAARC setiap pertemuan formalnya yakni upaya memerangi aksi terorisme di tingkat kawasan. Namun semenjak Konvensi Penanggulangan Terorisme beserta Protokol Tambahan ditandatangani, peristiwa serangan terorisme masih saja terjadi seperti kasus yang dijelaskan sebelumnya. Efek tidak hanya merugikan secara materiil, nyawa aparat keamanan, tetapi juga mempertaruhkan relevansi dan komitmen SAARC selaku organisasi regional dalam menciptakan situasi kawasan yang aman dan damai. Faktanya baik India dengan Pakistan tidak memiliki perjanjian ekstradisi satu

sama lain bahkan upaya ataupun rancangan terkait perjanjian ekstradisi tersebut tidak ditemukan (Ministry of External Affairs India, 2023). Padahal jika kita telaah lagi pada Konvensi Penanggulangan Terorisme SAARC, saat ditekankan terjalinnya perjanjian ekstradisi antara negara anggota guna memudahkan dalam mengatasi pergerakan kelompok terorisme di kawasan Asia Selatan.

Kapabilitas militer yang dimiliki India-Pakistan sebagian besar bersumber dari hasil kerja sama Indo-US dan Pakistan-Tiongkok. Hal ini tidak mengherankan mengingat peningkatan jumlah uji coba senjata nuklir yang meningkatkan setelah tahun 2016. Selain itu, kerja sama strategis dari masing-masing aliansi secara tidak langsung berpengaruh pada ketegangan konflik antara India-Pakistan. Keuntungan yang diperoleh India-Pakistan dari masing-masing aliansi tentunya jauh lebih menggoda ketimbang keuntungan dari SAARC terkhususnya keuntungan di bidang militer untuk mempersenjatai kedua negara terhadap satu sama lain.

Undang-undang '123 Act' misalnya memungkinkan Amerika Serikat untuk mentransfer bahan bakar dan teknologi nuklir ke India tanpa penandatanganan NPT serta membuka akses perdagangan dan kerja sama energi nuklir sipil guna mengikuti perkembangan rezim internasional. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga membantu agar India diakui sebagai anggota kelompok *Nuclear Supplier Group* (NSG) yang merupakan sebagai *platform* bagi negara pemilik senjata nuklir untuk melakukan aktivitas ekspor barang atau bahan berbasis nuklir sesuai aturan yang berlaku. Selain itu India-Amerika Serikat juga menyepakati "*Next Steps in Strategic Partnership*" (NSSP) di tahun 2004 yakni sebuah kerja sama dibidang teknologi nuklir sipil, ekonomi, non-proliferasi, keamanan, pembangunan, demokrasi, perdagangan teknologi tinggi dan kerja sama luar angkasa (Hussain et al,

2021). Dalam strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat, India diberi kepercayaan dalam membendung pengaruh dari China dengan melakukan kerja sama negara pesisir seperti Maladewa, Sri Lanka, Mauritius dan Seychelles. Dari perspektif India, kesempatan dapat dimanfaatkan sebagai pemenuhan strategi kebijakan luar negeri serta membantu India dalam mengimbangi konflik wilayah Ladakh melawan China dan konflik wilayah Kashmir melawan Pakistan.

Pakistan-China disatu sisi mengesahkan berbagai kerja sama. Salah satu perjanjian tersebut yakni *"The Treaty of Friendship, Cooperation and Good Neighborly Relations"* yang disahkan pada 2006 mengenai penguatan kerja sama dibidang perdagangan, infrastruktur, dan transfer teknologi nuklir (Rehman dalam Hussain, 2017). Perjanjian ini memungkinkan Pakistan dalam mengakses bahan bakar dan teknologi nuklir China serta rancangan Pakistan-China dalam membangun dua reaktor nuklir berkekuatan 1.100 megawatt di Karachi (Shah dalam Hussain, 2017). Pakistan juga menyerahkan pelabuhan Gwadar ke China, pelabuhan ini memiliki akses ke samudera Hindia dan laut Arab sehingga dapat dijadikan jalur pemasok energi serta memiliki potensi digunakan China untuk mengawasi aktivitas militer India dan Amerika Serikat di jalur laut tersebut (Hussain, 2017). Hingga saat ini pun China masih terus bekerja sama dengan Pakistan dalam bidang pertahanan baik itu berupa pelatihan, pengembangan energy, hingga penyuplai senjata. Selain dukungan militer, China juga turut mendukung Pakistan di forum Internasional, misalnya pada tahun 2006 India-Amerika menuntut Lashkar-e-Taiba dan Jamaat Ud Dawa sebagai kelompok teroris berbahaya dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, namun China menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan tuntutan India-Amerika Serikat.

India melihat jika kepemilikan senjata nuklir Pakistan-Tiongkok merupakan ancaman. Maka tidak mengherankan jika India mengeluarkan pendanaan nasional yang lebih besar terkhususnya *arms transfer* guna menyeimbangi kapabilitas militer musuhnya. Pakistan disisi lain tentu mau tidak mau mengikuti perkembangan persenjataan nuklir India sebagai ancaman yang ambigu. Belum lagi jika kita harus membandingkan pendanaan *arms transfer* dan kemampuan senjata nuklir milik Pakistan yang di bawah dari India menyebabkan situasi asimetri tersendiri. India mungkin saja menganggap jika China sebagai musuh utama sehingga berusaha mengejar kapabilitas nuklir China, namun Pakistan juga turut mengejar kapabilitas nuklir India sebab perspektif bahwa India adalah 'pesaing yang mengancam dalam kawasan'. Efek domino ini sukses menunjukkan adanya trilemma nuklir di kawasan Asia Selatan antara India-Pakistan-China.

c. Adanya Informasi Akurat Tindakan Aktor

Pengembangan senjata nuklir India-Pakistan tentunya menimbulkan rasa tidak aman bagi negara sekitarnya, belum lagi simulasi percobaan peluncuran rudal yang tak jarang diumumkan 5-2 hari sebelum peluncuran. Kekhawatiran seperti arah peluncuran rudal, kekuatan ledak dari rudal, dan jenis rudal yang digunakan menjadi ancaman tersendiri terhadap warga sipil dan sistem keamanan negara sekitar. Perlu kita ingat jika keputusan India-Pakistan yang tidak menandatangani *Non Proliferation Nuclear Weapon Treaty* (NPT) secara tidak langsung terhadap mempengaruhi kepastian keamanan bagi *non-nuclear weapon state*. Hal ini sejalan dengan pandangan dari Axelrod & Keohane (1985) bahwa aktor yang memiliki *power* seringkali dihadapkan dengan aktor yang *less power* sehingga menghasilkan matriks imbalan yang asimetris.

Negara India dan Pakistan berupaya menunjukkan pertanggungjawabannya terhadap pengembangan senjata nuklir hanya menggunakan doktrin senjata nuklir sebagai argumen defensif yang merupakan suatu bentuk kebijakan nasional negaranya. Walaupun sistem politik internasional bersifat anarki dengan kedaulatan negara merupakan kedudukan tertinggi namun memberikan jaminan negara lain menggunakan kebijakan yang hanya disetujui oleh satu negara tentu tidak dapat dijadikan jaminan yang dapat memastikan pertanggungjawaban mereka. Negara lain tidak dapat memastikan aksi negara tersebut di masa depan serta tidak ada kepastian sanksi jika memang negara pembuat “doktrin” (yang notabene adalah kebijakan nasional mereka) baik disengaja maupun tidak sengaja melanggar kebijakan nasionalnya. Jika kita telusuri doktrin “*No First Use*” digunakan India memiliki beberapa ketidakjelasan dan kemungkinan penyalahgunaan, misalnya pendapat dari Penasihat Keamanan Nasional India tahun 2010, Shivshankar Menon, yang menyatakan bahwa doktrin nuklir India melarang penggunaan terlebih dahulu kepada *non-nuclear state* (Sundaram & Ramana, 2018), berarti pernyataan ini tidak berlaku kepada negara pemilik senjata nuklir sehingga penggunaan senjata nuklir sebagai bentuk balasan akan tetap ada. Ditambah lagi dalam artikel milik Rajagopalan (Carnegie, 2016) membahas perdebatan antara kaum moderat dan ekspansionis terhadap doktrin nuklir India khususnya pada penggunaan kata “pembalasan besar-besaran” yang tidak dispesifikasi sehingga memunculkan asumsi baik dari publik dan pengamat mengenai serangan balasan nuklir India yang bisa jadi “pembalasan dengan skala yang besar” atau “serangan balasan pertama yang dirancang untuk menimbulkan kerusakan besar-besaran”. Di satu sisi, Pakistan juga memiliki doktrin nuklir “*Full-Spectrum Deterrence*” yang menjadi kebijakan dalam penggunaan senjata nuklir Pakistan yang difokuskan sebagai respon atas doktrin nuklir India

sehingga komponen kredibilitas dan minimalisme dari persenjataan nuklir Pakistan akan terus berubah-ubah (South Asian Voices, 2018).

Perlu adanya pihak ketiga sebagai motivator dan mediator pengesahan kesepakatan oleh negara pemilik senjata nuklir untuk dijadikan jaminan bagi negara yang berpotensi terkena dampak dari jika pada akhirnya senjata nuklir tersebut digunakan. Teori institusionalisme berpendapat jika negara dalam menciptakan organisasi internasional bertujuan untuk mempermudah kerja sama melalui penyediaan informasi dan titik fokus dalam bernegosiasi. Menurut Wallander dalam Eilstrup (2021) terdapat ‘aset umum’ yang sebaiknya dimiliki oleh organisasi internasional dalam mencapai keberhasilannya beradaptasi di tengah sistem politik anarki, aset tersebut berupa wadah bagi negara anggota untuk bekerja sama dan bertukar informasi yang efisien di berbagai sektor serta penetapan aturan yang jelas dalam bernegosiasi, pengambilan keputusan, pengawasan, dan penyelesaian masalah. Untuk konflik yang lebih kompleks misalnya, Jackson (2024) dalam bukunya memaparkan beberapa prinsip yang diperlukan untuk mencegah bencana nuklir, adapun prinsip tersebut yakni transparansi informasi kredibel, prediktabilitas kepastian keputusan atau pergerakan yang konsisten, empati strategis yang merujuk pada praktik atau etika dari negara dalam konfigurasi *zero-sum*, dan penyeimbangan antara pencegahan dan jaminan yang merujuk pada upaya pemastian antara upaya pencegahan terhadap tindakan yang tidak diinginkan atau upaya jaminan pertanggungjawaban atas penggunaan senjata (merujuk keamanan) yang digunakan pada upaya pencegahan.

Selama terbentuknya SAARC, tidak ditemukan hasil diskusi ataupun upaya pendekatan yang dilakukan untuk memastikan penggunaan yang bertanggung

jawab oleh kedua negara pemilik senjata nuklir itu padahal upaya uji coba dan pengembangan terus terjadi dan belum diketahui seberapa besar efek yang akan berdampak bagi negara disekitarnya. Sehingga ini menunjukkan jika SAARC masih belum memiliki 'aset umum' dan strategi dalam membentuk kesepakatan prinsip ditingkat regional dari persaingan senjata nuklir India-Pakistan. Faktor ini dapat kita pahami mengingat fenomena *security dilemma* yang dihadapi oleh India-Pakistan yang dipengaruhi oleh kapabilitas militer China serta larangan dalam membahas konflik bilateral dan multilateral di forum regional. Menurut Jervis (1999) neoliberalisme institusional melihat bahwa ada banyak perjanjian yang saling menguntungkan yang diabaikan oleh negara yang disebabkan *Prisoner's Dilemma* padahal jika negara ini bekerja sama dan menghasilkan kesepakatan yang manjur maka dampak independen dan fungsionalisme organisasi tersebut dapat dikatakan berjalan dengan baik.

Perlu diingat juga kembali putusan India-Pakistan untuk tidak menandatangani dan meratifikasi NPT dan CTBT sehingga SAARC akan sulit memperoleh informasi terkait bahan dasar nuklir dan jumlah penggunaannya dalam senjata yang dikembangkan ataupun diuji coba. Pada esai Downs, Rocke, dan Siverson (dalam Axelrod & Keohane, 1985) Negara yang terlibat persaingan senjata cenderung membuat senjata defensif ketimbang ofensif yang bertujuan untuk memberikan tingkat keamanan yang lebih besar, banyak perlombaan senjata yang dimulai tanpa mempertimbangkan konsekuensinya secara serius sehingga menunjukkan negara tidak menghargai jika tindakan mereka berdampak maupun ditafsirkan buruk oleh pihak lain. Sehingga upaya SAARC yang paling memungkinkan dilakukan yakni membentuk perangkat subregional yang membahas terkait kerja sama keamanan nuklir seperti yang dilakukan oleh ASEAN pada

komitmennya menjadi regional bebas senjata nuklir dengan strategi ASEANTOM. Padahal jika kita lihat keanggotaan dari India-Pakistan di IAEA seharusnya ini bisa dijadikan kesempatan bagi SAARC dalam membentuk upaya kolaborasi dengan IAEA untuk membujuk India-Pakistan terkait pengembangan dan penggunaan bahan nuklir dan radioaktif yang kooperatif dan bertanggung jawab.

Situasi ini semakin runyam dengan kehadiran negara aliansi yang "memfasilitasi" pengembangan nuklir India-Pakistan. Negara cenderung bekerja sama untuk mengurangi dampak anarki seperti menghasilkan keuntungan bersama dan menghindari kerugian (Jervis, 1999) sehingga untuk mengatasi *nuclear trilemma* di kawasan maka India bergantung pada Perancis dan Amerika Serikat lalu Pakistan bergantung pada China. Perbandingan keuntungan dan akses yang dimiliki oleh India-Pakistan terhadap negara aliansinya tentu melampaui apa yang ditawarkan oleh SAARC selaku institusi yang dibentuk dan dinaungi oleh India-Pakistan. Kematian organisasi internasional dipicu oleh perubahan atau guncangan politik-ekonomi besar-besaran yang mengurangi manfaat kolektif yang diterima oleh negara anggota organisasi (Eilstrup 2021). Fenomena ini juga diakui oleh Axelrod & Keohane (1985) jika kerja sama dalam permainan intra-aliansi meningkat maka ini mampu menghancurkan pola kerja sama yang lebih luas.

d. Respon Balik yang Cepat

Suatu kunci dari suatu organisasi Internasional dalam tingkat apapun, penting bagi pihak yang terlibat untuk mengedepankan rasa kepercayaan dan komunikasi yang baik. Para pakar teori Institusionalisme berpendapat jika upaya yang dilakukan oleh negara dalam memastikan ketersediaan informasi, data dan 'titik fokus' dalam menjalin kerja sama tanpa mengeluarkan biaya transaksi kerja sama

yang besar yakni membentuk lembaga institusi internasional (Eilstrup, 2021). Mereka juga melihat adanya bahaya yang muncul jika negara bergabung dalam organisasi hanya mencari peruntungan absolut sebab kerja sama yang dihasilkan hanya berpusat pada pihak tertentu dan mengorbankan negara lain dalam posisi yang dirugikan. Teori ini sendiri melihat kepatuhan dari anggota organisasi dapat terwujud jika negara memperoleh manfaat dari kerja sama dan mampu mewadahi interaksi timbal balik maka kerja sama tersebut akan berkembang secara masif, jika sebaliknya maka bisa dipastikan bahwa negara tidak akan mengembangkan kerja sama yang selanjutnya akan mempengaruhi perkembangan dari organisasi regional (Keohane, R. O., & Martin, L. L, 1995).

Terdapat perbedaan pada cara SAARC dalam mengatur jalannya diskusi dan pengambilan keputusan dengan cara ASEAN. ASEAN memiliki sistem yang mengedepankan keputusan bersama terkhususnya namun jika terdapat negara yang merasa dirugikan dapat menggunakan hak veto terhadap rancangan tersebut. Selain itu prinsip "*consensus minus X principle in ASEAN Way*" memberikan opsi bagi negara anggotanya dalam melakukan negosiasi bilateral jika terjadi *deadlock*. Cara lain yang dilakukan ASEAN dalam menghindari permasalahan kontroversial yakni menekankan praktik diplomasi senyap atau diplomasi informal yang memungkinkan kepala negara yang terlibat konflik untuk menyelesaikan masalahnya tanpa pertemuan formal (Karim, 2019).

Piagam SAARC, mereka melarang pembahasan isu konflik bilateral ataupun multilateral dalam forum yang dapat kita lihat sebagai upaya pengabaian dari suatu organisasi regional dengan visi menjalin persahabatan dan kepercayaan antar anggota organisasi. Efek tersebut diperparah lagi dengan kekosongan alternatif yang ditawarkan oleh SAARC untuk bernegosiasi,

kekosongan tersebut seakan - akan menunjukkan sikap SAARC "jika kalian memiliki konflik silahkan diselesaikan sendiri namun jangan pernah menjadikan forum SAARC sebagai wadah menyelesaikan konflik tersebut". Selanjutnya, pemimpin negara berkonflik tidak terbiasa melakukan upaya diplomasi informal seperti prinsip konsensus ASEAN dan berpendapat jika piagam SAARC tentang isu-isu bilateral seharusnya diubah agar dapat dibahas dalam forum, kedua faktor itu yang akhirnya mempersempit peluang diplomasi di luar forum. Penting bagi SAARC untuk setidaknya memberikan *statement* resmi dan upaya diplomasi yang komprehensif terhadap masalah ini sebab jika SAARC tidak dapat mengoptimalkan 'aset umum' terhadap masalah India-Pakistan maka besar kemungkinan penggunaan senjata nuklir dan eskalasi konflik terjadi.

Hal ini tidak terlepas dari negara yang berseteru merupakan negara besar di kawasan yang memiliki hegemoni, terkhususnya India dengan kapabilitas ekonomi dan militer yang dimilikinya, tak heran jika India merasa harus diterima sebagai kekuatan besar di kawasan (Sajjad et al, 2022). Hal ini diperkuat dengan beberapa negara di kawasan seperti Bhutan dan Nepal yang cenderung terdiri atas dataran tinggi sehingga untuk memudahkan ekonominya perlu menjalin kerja sama ekonomi dan mobilitas dengan India, selain itu Bangladesh dan Nepal juga bergantung dengan India untuk memperoleh air (Ayoob dalam Sajjad et al. 2022).

Ketergantungan ini kemudian secara tidak langsung menjadi suatu rasa segan bagi negara - negara kecil di kawasan jikalau mereka berupaya mendorong negosiasi atas konflik dua negara dominan India-Pakistan. Choquier dalam Karim (2019) melihat jika India merasakan adanya potensi terbentuknya aliansi yang terdiri dari negara kecil di kawasan yang ingin melawan India jika SAARC meloloskan ketentuan terkait

pembahasan konflik bilateral dalam forum. Sehingga efek dari upaya hegemoni yang dilakukan India sukses menghalau 'rasa kepedulian' anggota organisasi dan mempengaruhi perpecahan reaksi dan respon dari SAARC.

PENUTUP

Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh peneliti, ditemukan bahwa terjadi peningkatan anggaran pembelian senjata dan persentase impor senjata global baik dari India-Pakistan pasca 2016. Selain itu ditemukan juga laporan bahwa negara aliansi dari masing-masing negara berperan dalam mengeksport senjata ke India-Pakistan. Dari laporan yang telah dikumpulkan ditemukan juga jika India-Pakistan cenderung lebih aktif melakukan uji coba rudal balistik berbahan nuklirnya di rentang tahun 2016-2021.

Situasi penyerangan terorisme, persaingan senjata nuklir dan peran negara aliansi kemudian mempengaruhi relevansi dari SAARC. Keputusan SAARC dalam membatasi forum untuk membahas konflik bilateral dan multilateral juga memperburuk situasi konflik India-Pakistan Berdasarkan analisis teori Neoliberalisme dan Liberal Institusionalisme dapat disimpulkan jika SAARC gagal dalam menganalisis bayangan di masa depan, menjaga stabilitas krisis di kawasan, wadah bagi negara anggota dalam memperoleh informasi kredibel, dan mediator konflik.

Kegagalan SAARC dalam menganalisis bayangan di masa depan dan mediator konflik dilihat dari SAARC yang melarang pembahasan konflik bilateral-multilateral di forum dan maupun melaksanakan KTT-19 SAARC hingga saat ini sehingga eskalasi konflik India-Pakistan tidak terhindarkan dan memulai babak persaingan senjata nuklir di kawasan. Kegagalan SAARC dalam menjaga stabilitas krisis dan wadah dalam menyediakan informasi kredibel dapat terlihat dari ketidaktegasan prinsip dalam

mengimplementasikan Konvensi Penanggulangan Terorisme dan Protokol Tambahan Penanggulangan Terorisme sehingga tidak dapat membendung efek dari penyerangan terorisme di tahun 2016 dan minimnya upaya SAARC dalam menjadi pihak penjamin bagi non nuclear state di kawasan atas persaingan senjata nuklir serta minimnya motivasi untuk memanfaatkan pengembangan nuklir India-Pakistan menjadi kolaborasi energi nuklir yang bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Dugis, V (2016). *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-Perspektif Klasik*. Surabaya: Revka Petra Media. pp 81-105
- Izarali, M.R., & Ahlawat, D. (Eds.). (2021). *Terrorism, Security and Development in South Asia: National, Regional and Global Implications* (1st ed.). Routledge. pp 259-287
- Jackson, V. (2024). *What Should Be Done?: Practical Policies to Prevent Nuclear Catastrophe*. Asia-Pacific Leadership Network. Seoul. pp 20-24
- Kumar, A. (2012). *The Terror Challenge in South Asia and Prospect of Regional Cooperation*. Pentagon Security International. New Delhi. pp 118-143
- Levesques, A., Bowen, D. & Gill, J.H. (2021). *Nuclear Deterrence and Stability in South Asia: Perceptions and Realities*. The International Institute for Strategic Studies. pp 17-21
- Mas'oed, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES
- Menon, R & Rumer, E. (2022). *Russia and India: A New Chapter*. Carnegie Endowment for International Peace. Washington DC. pp 19-20
- Onwudiwe, I.D. & Mendie, E. (2021). Chapter 15: *The Impact of Terrorism in South Asia*. Terrorism, Security and Development in South Asia: National, Regional and Global Implications. Routledge. London. pp 265-282
- Rosand, E., Chowdhury, N., & Ipe, J. (2009). *Countering Terrorism in South Asia: Strengthening Multilateral Engagement*.

- International Peace Institute Publications. pp 3-12
- Saalman, L. & Topychkanov, P. (2021). South Asia's Nuclear Challenges: Interlocking Views from India, Pakistan, China, Russia and The United States. Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
- Salik, N. (n.d). The Evolution of Pakistan's Nuclear Doctrine. Nuclear Learning: The Next Decade in South Asia. London. pp 71-84
- Sutikno, S.M. & Hadisaputra, P. (2020). Penelitian Kualitatif. Lombok: Holistica Lombok
- Williams, P. D. (2008). Security studies: An Introduction. Routledge. pp 291-29
- Akhter, Z., Islam, M. T., & Karim, M. A. (2015). Impediments to Counter-Terrorism Cooperation in South Asia: A Theoretical Explanation, BIIS JOURNAL. 36. 117-132. https://www.researchgate.net/publication/308453559_IMPEDIMENTS_TO_COUNTER-TERRORISM_COOPERATION_IN_SOUTH_ASIA_A_THEORETICAL_EXPLANATION/link/57e4902908ae9e8425a25cbe/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uLiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
- Allauddin, Khalid, A., & Ali, M.M. (2021). Pakistan-China Nuclear Energy Cooperation: Emerging Trends to Achieve Sustainable Development Goals. Pak. Journal of Int'L Affairs, Vol 4(1). <http://large.stanford.edu/courses/2023/ph240/ee1/docs/allauddin-2021.pdf>
- Azad, T.M. (2024). US-China Strategic Engagements in South Asia: a Regional Perspective. Research Journal of Social Sciences. Vol.21(21):1-14. https://www.researchgate.net/publication/379115258_US-CHINA_STRATEGIC_ENGAGEMENTS_IN_SOUTH_ASIA_A_REGIONAL_PERSPECTIVE
- Béraud-Sudreau et al. (2022). The SIPRI Top 100 Arms-producing and Military Services Companies, 2021. <https://doi.org/10.55163/vyjc8517>
- Bhardwaj, V.K. (n.d). South Asia and SAARC: Intra-regional Cooperation and Conflicts. Rajasthan. https://www.academia.edu/21852124/South_Asia_and_SAARC_Intra_regional_Cooperation_and_Conflicts
- Bishwakarma, J.K. & Hu, Z. (2022). Problem and Prospects for the South Asia Association for Regional Cooperation (SAARC). Policy Studies Organization. 50:154-179. <https://doi.org/10.1111/polp.12443>
- Das, S. (2021). The Issues of Terrorism: The Prospect of Security in South Asia. Journal of University of Shanghai for Science and Technology. Vol. 23(9). pp 85-89. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/115635323/The-Issue-of-Terrorism-The-Prospect-of-Security-libre.pdf?1717491645=&response-content-disposition=attachment%3B+filename%3DThe_Issue_of_Terrorism_The_Prospect_of_S.pdf&Expires=1720662848&Signature=bHpVG6KVr5eEA0laKOW~kDPE2fFDDSaoA72zxxp0tYQNpAi0QRN-TzhlBiEqy7Z9yIQMsp6J4QMYMeGKbGWik-u1ZPYE5BAQkByJPIstWgqZkWWTo0G9gVPhMWNyuWgkt4zCmqtm5hP-0Ng7O2vT0wUbV4CiR6OCuf8ScCDQmO1VrR3bw2w7VRsWgppP3DIoQezb4XW4ZtDSspYQ93ymUwwhe1w6pkovMYt4Csfp0y2ncrN8LWfbBwS4x78M-4hsVxjnBemHccIMGX6j6HpL9OWuJ~vemqNL0~IYXb0zccfWQmb4usw5w1U9sS0sTiXB7pOD~ZZtHvXvCf~cLboA_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- Gul, A., Hussain, M., Imran, S., Rehman, A.U., & Haider, S.A. (2021). Assessing Various Opportunities and Challenges in India-US Strategic Partnership. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Vol. 24(1). https://www.researchgate.net/publication/354600453_Assessing_Various_Opportunities_and_Challenges_in_India-US_Strategic_Partnership
- Hans. M. K., et al. (2023). Pakistan Nuclear Weapons, 2023. <https://doi.org/10.1080/00963402.2023.2245260>
- Hussain, M. (2017). Impact of India-United States Civil Nuclear Deal on China-Pakistan Strategic Partnership. Journal of South Asian Studies. Vol. 5(1). 13-25. https://www.researchgate.net/publication/317008786_Impact_of_India-United_States_Civil_Nuclear_Deal_on_China-Pakistan_Strategic_Partnership
- Idress, M & Naazer, M.A. (2017). Conflicts and Conflict Management in SAARC: Assessing the Challenges and Way Forward. Liberal Arts and Social Sciences International Journal.

- Vol.1, No.2, 1-11.
<https://doi.org/10.47264/idea.lassij/1.2.1>
- Jabeen, M. & Choudhry, I. A, (2013). Role of SAARC for Countering Terrorism in South Asia. *South Asian Studies*. Vol.28, 389-403.
https://pu.edu.pk/images/journal/csas/PDF/11%20Dr.%20Ishtiaq_v28_2_13.pdf
- Kaler, S. (2016). Successes and Failures of SAARC. *Indian Journal of Applied Research*. Vol. 6(3).
[https://www.worldwidejournals.com/indian-journal-of-applied-research-\(IJAR\)/recent_issues_pdf/2016/March/March_2016_1492082858....66.pdf](https://www.worldwidejournals.com/indian-journal-of-applied-research-(IJAR)/recent_issues_pdf/2016/March/March_2016_1492082858....66.pdf)
- Kamal, M. & Batool, S. (2019). SAARC: Regionalism and Regional Security in South Asia. (*Epistemology Ilmiyyat Pakistan*)
- Karim, M.R. (2019). Same Principles but Different Outcomes of SAARC and ASEAN: Searching Gap: *Journal of Public Administration and Governance*. Vol. 9, No. 1.
<https://doi.org/10.5296/jpag.v9i1.14266>
- Keohane, R. O., & Martin, L. L. (1995). The Promise of Institutional Theory. *International Security*, 20(1), 39–51.
<https://doi.org/10.2307/2539214>
- Khan, M.T.F. (2016). 19th SAARC Summit: Prospects and Challenges. *Institute of Strategic Studies*.
<https://issi.org.pk/issue-brief-on-19th-saarc-summit-prospects-and-challenges/>
- Kristensen, H. M., & Korda, M. (2022). Indian nuclear weapons, 2022. *Bulletin of the Atomic Scientists*, 78(4), 224–236.
<https://doi.org/10.1080/00963402.2022.2087385>
- Kristensen, H.M. & Korda, M. (2022). *Indian Nuclear Weapons, 2022*. Routledge Taylor & Francis Group. Vol. 78, No. 4, 224-236.
<https://doi.org/10.1080/00963402.2022.2087385>
- Majid, A. (2018). SAARC Prospects and Challenges. *A Research Journal of South Asian Studies*, Vol. 33, No.1, 185-197.
https://pu.edu.pk/images/journal/csas/PDF/11_v33_1_18.pdf
- Muzaffar, M., Jathol I. & Yaseen, Z. (2017). SAARC : An Evaluation of Its Achievement, Failure, and Compulsion for Cooperation. (*Global Political Review*)
- Naazer, M. (2017). SAARC SUMMIT 1985-2016: The Cancellation Phenomenon. *IPRI Journal* XVII, No.1, 43-71.
https://www.researchgate.net/publication/322055122_SAARC_SUMMIT_1985-2016_THE_CANCELLATION_PHENOMENON
- Rajagopalan, R. (2016). India's Nuclear Doctrine Debate. *Carnegie Endowment for International Peace*.
<https://carnegieendowment.org/2016/06/30/india-s-nuclear-doctrine-debate-pub-63950>
- Sajjad, N., Munir, T., & Batool, S. (2022). Indian Hegemonic Design in South Asia: Implication for Regional Stability: *Global International Relation Review*, V(III), 28-34.
[https://doi.org/10.31703/girr.2022\(V-III\).04](https://doi.org/10.31703/girr.2022(V-III).04)
- Satnyoto, N. (2017). Perspektif Teori Institusionalisme dan Teori Kritis terhadap Rezim Internasional Lingkungan. *Interdependence Jurnal*, Vol.5 No.2
- Sethi, M. (2007). Pakistan's Nuclear Doctrine and Strategy. *Air Power Journal*. Vol.2 No.3.
<https://www.bing.com/ck/a?!&p=3d6fcfb682847dfeJmltdHM9MTcyMDU2OTYwMCZpZ3VpZD0yOWRlYzJlYS0yNGVklTZmMTQtMWY1Ni1kNjY5MjViYjZlZTAmaW5zaWQ9NTE4NA&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=29dec2ea-24ed-6f14-1f56-d66925bb6ee0&psq=manpreet+sethi+pakistan+nuclear+doctrine+and+strategu&u=a1aHR0cHM6Ly9jYXBzaW5kaWEub3JnL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzEwL01hbG9uByZWV0LVNldGhpLTQucGRm&ntb=1>
- Sharma, S.H. (2024). Trends in SAARC: Achievements, Challenges and Future Prospects. *International Journal of Novel Research and Development*. Vol. 9(5).
<https://www.ijnrd.org/papers/IJNRD2405369.pdf>
- Sudirman, A. (2018). *The India-Pakistani Military and Nuclear Arms Race in Post-Cold War Period: The Regional Security Complex in South Asia*. (University of Padjajaran)
- Sundaram, K. & Ramana, M. V. (2018). India and the Policy of No First Use of Nuclear Weapons. *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*. Vol. 1, 152-168.
<https://doi.org/10.1080/25751654.2018.1438737>
- Sundaram, K., & Ramana, M. V. (2018). India and the Policy of No First Use of Nuclear Weapons.

- Journal for Peace and Nuclear Disarmament, 1(1), 152–168. <https://doi.org/10.1080/25751654.2018.1438737>
- Supriyantno, D. (2017). Peran Association For Regional Cooperation (SAARC) dalam Penyelesaian Sengketa Kashmir. (Muhammadiyah University of Yogyakarta)
- Wezeman, S. T., & Wezeman, P. D. (2023). Trends in international arms transfers, 2022. <https://doi.org/10.55163/cpns8443>
- Al Jazeera. (2019). Timeline: India-Pakistan Relation. diakses pada <https://www.aljazeera.com/news/2019/3/1/timeline-india-pakistan-relations>
- Arms Control Association. (n.d). The U.S.-India Nuclear Deal: Taking Stock. diakses pada <https://www.armscontrol.org/act/2005-10/features/us-india-nuclear-deal-taking-stock>
- BBC Indonesia. (2019). India-Pakistan: Apa yang terakhir kali terjadi saat ketegangan kedua negara meningkat, bagaimana suasana sekarang?. diakses pada <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47400049>
- BBC. (2019). Balakot air strike: Pakistan shows off disputed site on eve of India election. diakses pada <https://www.bbc.com/news/world-asia-47882354>
- Carnegie Endowment for International Peace. (2016). Pakistan's Nuclear Use Doctrine. diakses pada https://carnegieendowment/research/2016/06/pakistans-nuclear-use-doctrine?lang=en&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp
- Carnegie Endowment for International Peace. (n.d). Regional Voices on the Challenges of Nuclear Deterrence Stability in Southern Asia. diakses pada <https://carnegieendowment.org/programs/south-asia/regional-voices-on-the-challenges-of-nuclear-deterrence-stability-in-southern-asia?lang=en>
- Centre for Strategic and Contemporary Research. (2017). Implacable Failures of the SAARC. diakses pada <https://cscr.pk/explore/themes/politics-governance/implacable-failures-of-the-saarc/>
- CNN World. (2016). Soldier killed in army base attack in Indian-administered Kashmir. diakses pada <https://edition.cnn.com/2016/09/18/asia/india-kashmir-attack/index.html>
- Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty. (2019). Get The Facts CTBT. diakses pada https://media.nti.org/documents/ctbt_fact_sheet.pdf
- Council Foreign Relations. (2010). China-Pakistan Relations. diakses pada <https://www.cfr.org/backgrounder/china-pakistan-relations>
- Council Foreign Relations. (2018). 'No First Use' and Nuclear Weapons. diakses pada <https://www.cfr.org/backgrounder/no-first-use-and-nuclear-weapons>
- Hindustan Times. (2016). Punjab's Pathankot air base attacked: How it happened. diakses pada <https://www.hindustantimes.com/india/punjab-s-pathankot-air-base-under-attack-what-we-know-so-far/story-iKZLOzp7QYov9pveZyUHoJ.html>
- Hindustan Times. (2023). India World's Top Arms Importer in 2018-2022. Ukraine 3rd Largest in 2022: SIPRI. diakses pada <https://www.hindustantimes.com/india-news/india-remains-top-weapons-importer-sipri-report-101678735881623.html>
- India Today. (2023). Pulwama Attack 2019, everything about J&K terror attack on CRPF by terrorist Adil Ahmed Dar, Jaish-e-Mohammad. diakses pada <https://www.indiatoday.in/india/story/pulwama-attack-2019-everything-about-jammu-and-kashmir-terror-attack-on-crpf-by-terrorist-adil-ahmed-dar-jaish-e-mohammad-1457530-2019-02-16>
- Indian Council of World Affairs. (2016). Feigning Ignorance: The Pakistani Way - From Uri to the Surgical Strike. diakses pada https://icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=596&lid=538
- International Atomic Energy Agency. (n.d). Basics of IAEA Safeguards. diakses pada <https://www.iaea.org/topics/basics-of-iaea-safeguards>
- International Atomic Energy Agency. (n.d). Nuclear safeguards explained. diakses pada <https://www.iaea.org/topics/safeguards-explained>

- Kompas.com. (2019). Konflik Pakistan-India: Sejarah yang Berawal dari Perebutan 1 Wilayah. Diakses pada <https://internasional.kompas.com/read/2019/03/02/13183501/konflik-pakistan-india-sejarah-yang-berawal-dari-perebutan-1-wilayah?page=all>
- Ministry of External Affairs Government of India. (2003). The Cabinet Committee on Security Reviews Operationalization of India's Nuclear Doctrine. Diakses pada <https://www.mea.gov.in/pressreleases.htm?dtl/20131/The+Cabinet+Committee+on+Security+Reviews+perationalization+of+Indias+Nuclear+Dctrine>
- Ministry of External Affairs. (2023). Countries with which India has Extradition Treaties/Arrangements. diakses pada <https://www.mea.gov.in/leta.htm>
- NDTV. (2019). Exclusive: Why Air Force Has Not Shown Proof Of Balakot Strike. diakses pada <https://www.ndtv.com/india-news/exclusive-why-indian-air-force-has-no-video-proof-of-air-strike-in-pakistans-balakot-by-mirage-2000-2028332>
- NDTV. (2019). Exclusive: Why Air Force Has Not Shown Proof Of Balakot Strike. diakses pada <https://www.ndtv.com/india-news/exclusive-why-indian-air-force-has-no-video-proof-of-air-strike-in-pakistans-balakot-by-mirage-2000-2028332>
- NEWS 18. (2024). Pulwama Attack: History and Significance if the Tragic Incident on 5th Anniversary of the Black Day in India. diakses pada <https://www.news18.com/india/pulwama-attack-5th-anniversary-the-tragedy-indias-response-and-10-quotes-saluting-the-bravehearts-8777166.html>
- Reuters. (2019). Pakistan dismisses Indian terror dossier as mostly social media content'. diakses pada <https://www.reuters.com/article/us-india-kashmir-pakistan-dossier-idUSKCN1R90TP/>
- SAARC. (2020). SAARC Summits. diakses pada <https://saarc-sec.org/index.php/about-saarc/saarc-structure/saarc-summits>
- SIPRI. (2016). Nuclear Trends in South Asia. diakses pada <https://www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/weapons-mass-destruction/nuclear-trends-south-asia>
- SIPRI. (2022). Trends in International Arms Transfers, 2021. diakses pada <https://www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/weapons-mass-destruction/nuclear-trends-south-asia>
- https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-03/fs_2203_at_2021.pdf
- South Asia Monitor. (2021). SAARC must be revived as an intra-regional cooperation platform. diakses pada <https://www.southasiamonitor.org/spotlight/saarc-must-be-revived-intra-regional-cooperation-platform>
- South Asian Voices. (2018). Pakistan's Full-Spectrum Deterrence: Trends and Trajectories. diakses pada <https://southasianvoices.org/pakistan-full-spectrum-deterrence-trends-trajectories/>
- South Asian Voices. (2021). The Need for a Regional Mechanism for Nuclear Security in South Asia. diakses pada <https://southasianvoices.org/prospects-for-a-regional-mechanism-for-nuclear-security-in-south-asia/>
- Stanford University. (2015). U.S- India Civil Nuclear 123 Agreement. diakses pada <http://large.stanford.edu/courses/2015/ph241/agrawal1/>
- Statista. (n.d). Share of Defense import to India from 2019 to 2023, by country of origin. diakses pada <https://www.statista.com/statistics/1345382/india-share-of-defense-import-by-country/>
- Tactic Institute for Security & Counter Terrorism. (2024). SAARC Efforts against Terrorism. diakses pada <https://tacticsinstitute.com/asia/saarc-efforts-against-terrorism/>
- The Diplomat. (2015). Pakistan: Lesson from the India-US Nuclear Deal. diakses pada <https://thediplomat.com/2015/06/pakistan-lessons-from-the-india-us-nuclear-deal/>
- The Diplomat. (2016). How to Counter Terrorism in Southeast Asia. diakses pada <https://thediplomat.com/2016/08/how-to-counter-terrorism-in-southeast-asia/>
- The Diplomat. (2016). SAARC Summit Cancellation Will Sting Pakistan, But Won't Prevent the Next Uri or Pathankot. diakses pada <https://thediplomat.com/2016/09/saarc-summit-cancellation-will-sting-pakistan-but-wont-prevent-the-next-uri-or-pathankot/>
- The Diplomat. (2016). The Key to Understanding the Pathankot Attack. diakses pada <https://thediplomat.com/2016/01/the-key-to-understanding-the-pathankot-attack/>
- The Diplomat. (2016). The Key to Understanding the Pathankot Attack. diakses pada <https://thediplomat.com/2016/01/the-key-to-understanding-the-pathankot-attack/>

<https://thediplomat.com/2016/01/the-key-to-understanding-the-pathankot-attack/>

The Diplomat. (2022). India and the US: Defense Collaboration is Key. diakses pada <https://thediplomat.com/2022/04/india-and-the-us-defense-collaboration-is-key/>

The Diplomat. (2022). Is Regional Integration Still Relevant for India in South Asia?. diakses pada <https://thediplomat.com/2022/01/is-regional-integration-still-relevant-for-india-in-south-asia/>

The Diplomat. (2022). Russia's Outsized Role in India's Nuclear Power Program. diakses pada <https://thediplomat.com/2022/05/russias-outsized-role-in-indias-nuclear-power-program/>

The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC). About Us. diakses pada <https://www.saarc-sec.org/index.php/about-saarc/about-saarc>

The Washington Post. (2016). India claims 'surgical strikes' against militants in Pakistan-controlled Kashmir. diakses pada https://www.washingtonpost.com/world/india-hits-militant-launchpads-in-pakistan-in-escalation-between-nuclear-armed-rivals/2016/09/29/e0145168-d97e-4149-977a-24d08b16ea0b_story.html

UNODA. (n.d). Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). diakses pada <https://disarmament.unoda.org/wmd/nuclear/npt/>

World Bank Group. (n.d). Arms Imports (SIPRI trend indicator values) - India, Pakistan. diakses pada https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-03/fs_2203_at_2021.pdf

World Nuclear Association. Nuclear Power in Pakistan. diakses pada <https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/pakistan.aspx>